

Implementation of Village Government Apparatus Performance in Public Services to the Community (Malasan Village, Durenan District, Trenggalek Regency)

Salsala Ghosi Ainiha^{1*}, Lukman Yudho Prakoso²

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Malang

Corresponding Author: Salsala Ghosi Ainiha salsalaghosi08@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords : Performance,
Village Government
Apparatus, Public Services

Received : 01 October

Revised : 14 October

Accepted: 16 November

©2023 Ainiha, Prakoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The power exercised by the village government requires the apparatus to be able to work well for the surrounding area, but this has not been implemented due to several factors. The aim of this research is to find out how village officials perform in providing public services to the community. Information is obtained through interviews, observations and documentation. The sources decided are the village head, village officials and the local community. The focus of the research is work results (quality and quantity), apparatus capabilities, level of initiative/creativity, behavior, level of punctuality in services and discipline of village officials. The results of the research show that the performance of the Malasan Village Apparatus in public services is not good, this is due to a lack of technological and information knowledge, a lack of initiative and creativity in work, as well as a lack of responsibility and work discipline. So that the completion of work, especially in providing services, is still hampered and has not been completed properly.

Pelaksanaan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek)

Salsala Ghosi Ainiha^{1*}, Lukman Yudho Prakoso²

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Malang

Corresponding Author: Salsala Ghosi Ainiha salsalaghosi08@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kinerja, Aparatur Pemerintah Desa, Pelayanan Publik

Received : 01 Oktober

Revised : 14 Oktober

Accepted: 16 November

©2023 Ainiha, Prakoso: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kekuasaan yang digerakkan oleh pemerintah desa mengharuskan aparatur mampu bekerja dengan baik bagi wilayah sekitarnya, namun hal tersebut belum terlaksana karena adanya beberapa faktor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Informasi diperoleh melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Sumber yang diputuskan adalah kepala desa, aparatur desa dan masyarakat setempat. Adapun fokus penelitian yaitu Hasil Kerja (Kualitas dan Kuantitas), Kemampuan Aparat, Tingkat Inisiatif/Kreatifitas, Tingkah Laku, Tingkat Ketepatan Waktu dalam Pelayanan dan Kedisiplinan Aparatur Desa. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Aparatur Desa Malasan dalam pelayanan publik kurang baik, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan teknologi dan informasi, kurangnya inisiatif dan kreativitas dalam bekerja, serta kurang bertanggungjawab dan disiplin kerja. Sehingga penyelesaian pekerjaan khususnya dalam memberikan pelayanan masih terhambat dan belum terselesaikan dengan baik.

PENDAHULUAN

Berdasarkan sistem pemerintahan publik di Indonesia, pemerintahan desa merupakan sub-kerangka terkecil dan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Meskipun pemerintah desa menjalankan sebagian urusan pemerintahan, tetapi kedudukannya bukan merupakan organisasi pemerintahan yang sesungguhnya seperti organisasi pemerintah lainnya. Pemerintahan desa lebih tepat disebut sebagai lembaga kemasyarakatan yang mengurus kepentingan setempat dan menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut Pasal 25 UU Nomor 6 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan “ Pemerintah desa adalah kepala desa, atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain”. Literatur dan nomenklatur pada organisasi pemerintah desa disesuaikan dengan kebijakan daerah kabupaten/kota masing-masing. Kepala Desa dan aparat sebagai pelaksana kewajiban dalam pemerintahan desa, sudah seharusnya dapat melaksanakan kewajibannya seperti memberikan pelayanan, pengembangan dan penguatan yang baik untuk menjadikan Pemerintahan Desa, serta membantu dan memenuhi kebebasannya sebagai penduduk Indonesia.

Pelayanan publik yang diberikan oleh otoritas publik baik pada tingkat masyarakat umum tidak memenuhi kualitas yang diharapkan oleh daerah. Hal ini terlihat dari adanya keluhan dari masyarakat sebagai penerima pelayanan dari pemerintah, yang dapat menimbulkan citra buruk terhadap pemerintah desa. Melihat hal tersebut, maka penulis mengajukan sebuah isu yang merinci khususnya “ Pelaksanaan Kinerja Aparatur Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek”.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Kinerja

Menurut Rivai (2005: 14) “Kinerja adalah hasil atau tingkat kemajuan umum seseorang selama periode tertentu dalam melakukan tugas-tugas yang kontras dan potensi hasil yang berbeda”. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan kinerja pada dasarnya suatu tingkat kemajuan individu dalam menyelesaikan suatu kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, kinerja dapat diketahui apabila seseorang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh organisasi tempat ia bekerja.

b. Aparatur Pemerintah Desa

Desa merupakan suatu wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup berdampingan, dan mempunyai kesamaan tradisi, terlebih lagi mempunyai cara tersendiri dalam memilah keberadaan masyarakatnya. Aparatur desa merupakan salah satu penggerak utama dalam bidang pemerintahan, yang terdiri dari kepala desa dan seluruh pemerintah desa sebagai pelaksana komitmen mereka dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Posisi aparat desa sangat penting untuk menentukan sejauh mana pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Pemerintah desa merupakan sub-susunan dari struktur hierarki kekuasaan publik. Jadi desa

mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dan mengurus kepentingan daerah setempatnya.

c. Pelayanan Publik

Tugas utama pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Ini tidak dibuat untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap penduduk mengembangkan kapasitas dan inovasinya untuk mencapai tujuan bersama." (Rasyid, 1996). Peraturan Nomor 25 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Pelayanan Publik adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap penduduk dan yang berhubungan dengan barang, jasa, dan juga layanan terbuka yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Oleh karena itu, pelayanan publik diartikan setiap kegiatan yang berguna dalam suatu organisasi atau unit, dan memberikan kepuasan pelayanan kepada seseorang. Untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, maka organisasi publik atau pemerintahan harus mengetahui dan memahami segala tuntutan, keinginan, harapan atau tingkat kepuasan pelanggan. Agar bisa memberikan pelayanan yang berkualitas, pemerintah harus menyadari dan melihat semua permintaan, keinginan, asumsi atau tingkat pemenuhan masyarakat.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dimana peneliti berusaha mendeskripsikan pelaksanaan kinerja aparatur desa dalam pelayanan publik di desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek secara sistematis, dan nyata dalam kaitannya dengan realitas yang sedang diselidiki. Teknik pengumpulan data ini meliputi informasi penting yang diperoleh melalui wawancara dan informasi tambahan yang diperoleh dari buku atau dokumen pendukung. Penentuan sumber menggunakan strategi purposive, yaitu cara menentukan saksi tergantung pada tujuan atau kebutuhan yang ditentukan oleh analisis itu sendiri (Moleong 2007: 224). Pengambilan saksi dengan menggunakan teknik purposif terdiri dari 3 orang pemerintah desa dan 3 orang masyarakat yang terkait dengan pelayanan publik di Desa Malasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Malasan merupakan sebuah desa di Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Desa Malasan memiliki Luas 462.875(Ha) dengan Kordinat Bujur 591130 dan Kordinat Lintang 9101724 dengan jumlah penduduk 6254 yang dibagi menjadi laki-laki berjumlah 3.129 dan perempuan berjumlah 3.135 dengan jumlah kepala keluarga 2.272. Batas desa ini di sebelah utara desa Karangnom dan Sumbergayam kecamatan Durenan, ke arah selatan desa Sanan dan Pecuk Kecamatan Pakel, ke arah timur desa Bangunjaya dan Gempolan, Kecamatan Pakel, dan ke arah barat desa Panggungsari.

Pemerintahan Desa Malasan mempunyai struktur yaitu Badan Permusyawaratan Desa yang tidak dapat dibedakan dengan kedudukan Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada 5 Kepala Dusun. Kepala Pemerintahan Desa membawahi 3 Kepala Urusan, yaitu Kepala Bagian Penataan, Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala Bagian Umum. Terdapat 3 Kepala Seksi yang terdiri atas Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kasi Pelayanan yang juga membawahi 5 staf yaitu Kepala Staf Pemerintahan, Kepala Staf Penataan, Kepala Staf Keuangan, Staf Kesejahteraan Rakyat, dan Staf Kepala Kasi Pelayanan.

Kebanyakan Otoritas Desa saat ini memahami bahwa mereka adalah aparatur desa yang penting bagi pemerintahan yang mengendalikan masalah-masalah pemerintahan. Aparatur Desa mengetahui tanggung jawab dan batasannya sebagai Pemerintah Desa, seperti yang terlihat dari rangkaian pekerjaan yang wajar untuk setiap jabatan. Meski begitu, pada dasarnya mereka belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dan aturan-aturan penting dalam menjalankan tugasnya sebagai Pemerintah Desa, sehingga masih banyak kendala dalam menyelesaikan perannya di sini.

Kendala ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya pelaksanaan pemerintahan desa yang wewenangnya tidak jelas; terbatasnya kapasitas otoritas publik untuk menjalankan pemerintahan saat ini, seperti menggunakan komputer dan teknologi web; posisi pekerja pemerintah desa yang kurang jelas ; tidak ada contoh yang masuk akal dan sesuai dalam memberikan “penghargaan dan disiplin” untuk mendesak pemerintah desa memberikan dukungan terbaik kepada masyarakat setempat; terlebih lagi, terbatasnya fasilitas dan kerangka pendukung, serta sikap psikologis otoritas pemerintah desa secara keseluruhan yang benar-benar memanfaatkan pandangan dunia penguasa, belum beralih ke pandangan dunia koperasi spesialis. Adapun fokus dari penelitian ini yaitu :

a) Hasil Kerja (Kualitas dan Kuantitas)

Kualitas

Sesuai dengan pendapat Geotsh dan Davis (dalam Tjiptono, 1996: 51) menyatakan bahwa: “Kualitas merupakan suatu kondisi yang berhubungan dengan barang, jasa, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan”. Hasil pertemuan dengan Kepala Desa Malasan khususnya Pak Sutrisno, mengatakan bahwa dari segi sifat pekerjaan menurutnya aparatur desa dalam menyelesaikan pekerjaannya hasilnya belum baik, dikarenakan ada sebagian aparat yang belum bisa mengoperasikan komputer dengan baik. Sehingga hal ini banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat pada umumnya karena hasil pekerjaannya kurang sempurna.

Sementara itu Kepala Seksi Pelayanan bernama Bapak Muhadi menyampaikan bahwa, sebagai aturan dalam pekerjaannya, ia berusaha menghasilkan kualitas terbaik dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai yang diharapkan masyarakat. Selain itu, dalam menyelesaikan kewajibannya dia mengutamakan kerapian dan ketelitian, meskipun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umumnya masih terdapat kesalahan.

Bagaimanapun, jika hal ini terjadi dan dia mendapat protes dari masyarakat, dia segera memperbaiki kesalahannya.

Dari hasil wawancara tersebut dapat menganalisa bahwa kualitas pelaksanaan Kinerja Aparatur Desa Malasan belum cukup baik, justru harus dibenahi kualitasnya agar terciptanya hasil pekerjaan yang lebih baik.

Kuantitas

Menurut Wungu, (2003) “ Kuantitas kinerja adalah suatu kisaran satuan perkiraan yang dihubungkan dengan banyaknya hasil pekerjaan yang dapat diukur dengan angka karena cenderung dilihat dari banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan”.

Hasil pertemuan dengan Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa mengatakan, “Sesuai pengamatan saya pelayanan yang diharapkan oleh daerah setempat pada umumnya adalah *pengurusan KTP dan Kartu Keluarga*. Namun, jumlah orang yang dilayani setiap minggunya tidak menentu, terkadang banyak tergantung pada jumlah orang yang membutuhkan dan terkadang sedikit, yang disebabkan aparaturnya desa tidak berada di kantor selama jam kerja membuat masyarakat protes dan memilih untuk pergi karena mereka telah menunggu terlalu lama”.

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan Kasi Pelayanan, Bapak Muhadi mengatakan “Selama saya menjabat sebagai kasi pelayanan, saya sering melayani daerah setempat membuat surat keterangan misalnya SKTM, membuat surat wasiat tanah, surat pengantar misalnya Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan berbagai hal yang berhubungan dengan pemerintah desa”. Mengenai jumlah masyarakat yang kami layani dengan baik selalu tidak pasti kadang-kadang jumlahnya cukup banyak dan kadang-kadang sedikit sebanyak 4 hingga 6 orang saja”.

Hasil wawancara tersebut dapat di analisa bahwa pelayanan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat setempat sudah cukup baik, namun jumlah yang dilayani tidak menentu terkadang banyak dan sedikit karena tergantung dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

b) Kemampuan Aparat (Tingkat Pengetahuan)

Otoritas negara dan otoritas pemerintah diharapkan memiliki kemampuan berupa informasi, keterampilan, dan perspektif perilaku yang memadai, sesuai dengan permintaan pelayanan publik dan kemajuan saat ini (Handyaningrat, 1986). Sementara itu, ada lagi pemikiran yang menggambarkan kemampuan sebagai suatu sifat alamiah atau pembelajaran yang menyebabkan seseorang dapat mencapai sesuatu secara intelektual atau sungguh-sungguh (Bibson, 1991), sedangkan kemampuan atau kapasitas dikaitkan dengan usaha (Soetopo, 1999).

Hasil dari wawancara dengan Kepala Desa Bapak Sutrisno mengungkapkan bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa, yang diketahuinya bahwa Aparatur Desa sudah memiliki kemampuan yang cukup baik dan mampu menjalankan komitmen atau pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Memang masih ada di antara mereka yang meminta bantuan, namun hal ini tetap bisa diatasi sehingga pekerjaan di tempat kerja dapat terselesaikan dengan baik.

Bapak Agus Yuniarto selaku Kepala Bagian Pemerintahan (Kasi) menyampaikan bahwa, *“Sebagai Kepala Bagian Pemerintahan, dengan pengetahuan yang saya miliki saya telah menyelesaikan kewajiban saya dengan baik dan terlebih lagi dalam bidang yang saya geluti saya sudah memahaminya. Namun, mengenai komputer saya sebenarnya tidak terbiasa familiar menggunakannya dan kadang-kadang sering meminta bantuan kepada orang rumah. Jika ada hal lain yang saya tidak tahu, saya biasanya sering bertanya kepada rekan kerja saya”*.

c) Inisiatif dan Kreatifitas

Inisiatif adalah kemampuan untuk memilih dan mencapai sesuatu tanpa disuruh, mempunyai pilihan untuk memikirkan hal yang harus dilakukan terhadap sesuatu di sekitar kita, berusaha untuk terus bergerak dan menyelesaikan sesuatu apapun yang terjadi (Handoko 2010: 297).

Dari hasil penelitian ternyata masih ada beberapa aparatur desa yang sangat membutuhkan dukungan dan dukungan terlebih dahulu dari pimpinan dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan permasalahan yang ada di dunia kerja. Faktanya, saat bekerja mereka terlihat enggan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga hasilnya menjadi lambat dan tidak selesai tepat waktu. Oleh karena itu, setiap aparatur desa harus mempunyai pilihan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pekerjaannya, agar pekerjaannya dapat terselesaikan dengan baik dan tidak ada alasan untuk menunggu arahan orang lain.

d) Sikap (Tingkah Laku)

Sikap adalah cara berperilaku seorang individu atau dapat diartikan sebagai adanya cara berperilaku seorang individu yang pada umumnya akan ditentukan oleh masyarakat berdasarkan standar-standar yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Tindakan aparatur desa dapat terlihat dari hasil pertemuan dengan Ibu Maya, salah satu warga di yang mengatakan bahwa, *“Saya pikir sikap Aparatur Desa telah menunjukkan sikap ramah terhadap masyarakatnya, hal ini terlihat dari pelayanan yang berbeda-beda pada dasarnya semuanya ditangani dengan cara yang sama”*.

Kemudian Bapak Sutrisno selaku Kepala Desa juga mengatakan bahwa *“Sebagai kepala desa, saya merasa bertanggung jawab atas semua yang terjadi dengan masyarakat saya. Hal ini tidak terlepas dari cara saya dan aparatur memberikan pelayanan yang optimal. Bagaimana pun, saya akui sikap para aparat tidak bisa dikontrol secara keseluruhan, yang terpenting kepastian dan kesadaran diri aparat bisa diatasi sendiri”*.

e) Kedisiplinan (Tingkat Ketepatan Waktu dalam Pelayanan dan Kehadiran Aparatur)

Fokus utama dalam kedisiplinan adalah ketepatan dalam pelayanan dan kehadiran dan kehadiran aparatur. Sebaiknya pelayanan harus diberikan secara efektif dan produktif sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sesuai. Namun, masih banyak Aparatur Desa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuka hati mereka.

Bapak Wito seorang masyarakat setempat, mengatakan bahwa pelayanan di Kantor Desa Malasan menghabiskan sebagian besar waktu sehari-hari dan kacau karena pembagian kekuasaan yang tidak jelas, serta sikap pemimpin yang karena alasan sewenang-wenang memberikan tugas kepada bawahannya tanpa mempertimbangkan sebagian gagasan dan kekritisannya terhadap kualitas pelayanan.

Kemudian point kedua yaitu kehadiran atau absensi. Mengenai hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Sulastri, menyampaikan bahwa ketika ia datang ke kantor pada jam 8 atau bahkan jam 10 sebagian dari aparatur desa belum berada di tempat kerja bahkan ada yang tidak datang ke tempat kerja sama sekali tanpa izin. Dalam banyak kasus ditemukan di luar selama jam kerja karena mereka sibuk mengurus kebutuhan mereka yang bersifat individual seperti mengurus kebun atau pergi ke sawah untuk mencari berbagai jenis pendapatan dibandingkan dengan bekerja. Hal ini membuat pekerjaan mereka jauh lebih tertunda bahkan lebih lama penyelesaiannya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Hasil Kerja (Kualitas dan kuantitas)

Jika dilihat dari kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Desa, masih belum cukup baik. Karena dalam menyelesaikan pekerjaannya masih terdapat aparatur yang kurang berbakat dan kurang terampil dalam memanfaatkan teknologi seperti komputer, sehingga kualitas sifat pelayanannya harus perlu ditingkatkan untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik. Jika dilihat dari kuantitasnya dalam melayani kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat sudah cukup baik, namun jumlah yang dilayani oleh aparatur tidak menentu kadang banyak dan kadang sedikit sesuai kebutuhan masyarakat.

2. Kemampuan Aparat (Tingkat Pengetahuan)

Informasi mengenai pengetahuan dan teknologi Aparatur Desa masih buruk, karena masih ada beberapa aparatur yang belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya dengan memanfaatkan fasilitas kantor seperti komputer, sehingga hal ini dapat menghambat pekerjaan mereka dan menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat sekitar.

3. Inisiatif dan Kreatifitas

Sebagian besar Aparatur Desa saat ini memiliki tingkat motivasi yang cukup baik, hal ini terlihat dari pemikiran kreatif mereka dalam menyelesaikan pekerjaan, khususnya dalam melayani masyarakat setempat, meskipun masih ada sebagian kecil aparatur yang masih membutuhkan arahan dan dorongan terlebih dahulu dari Kepala Desa dan Aparatur lainnya untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan kerja.

4. Sikap (Tingkah Laku)

Sikap Aparatur Desa dilihat dari keramahan atau kebijakan serta kewajibannya melayani masyarakat sudah baik. Hal ini cenderung terlihat dari berbagai pelayanan yang pada dasarnya segala sesuatunya ditangani dengan cara yang sama.

5. **Kedisiplinan (Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan dan Kehadiran Aparat)**
Dari segi kedisiplinan, sebagian besar aparatur desa lamban dan belum fokus. Mengingat banyaknya aparatur desa yang bekerja, ada beberapa orang yang datang tepat waktu sebagian lagi sering terlambat. Hal ini terlihat oleh masyarakat setempat ketika pada jam kerja aparatur desa berada di luar tempat kerja dengan kepentingan pribadi.

Rekomendasi

1. Untuk hasil kerja, sebaiknya kepala desa harus meminta laporan langsung sehubungan dengan tugas yang diberikan kepada otoritas Kantor Desa Malasan.
2. Penting untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, khususnya dalam pengoperasian perangkat seperti komputer, dengan diberikan kesempatan yang lebih dari cukup untuk berpartisipasi dalam pelatihan dan perencanaan baik yang khusus maupun yang tidak khusus, bertujuan penuh untuk menghasilkan tenaga kerja yang cakap, dan melakukan pemenuhan bagi masyarakat setempat.
3. Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berhasil sehingga juga dapat meningkatkan kepercayaan diri dan energi kerja mereka.
4. Kepala Desa harusnya tegas dalam memberikan sanksi kepada pihak berwenang yang tidak memperhatikan aturan agar ada efek jera bagi pelakunya.

PENELITIAN LANJUTAN

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian dalam penulisan artikel ini. Mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Penelitian Selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, C., ABI, M.R., Muhammad, F. R .,(2019) Disiplin Pekerja pada Pemerintah Desa di Desa Cileles Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. *Jurnal Aplikasi Sains dan Inovasi untuk Masyarakat*. Falkutas Hukum. Perguruan Tinggi Padjadjaran
- Diana, Daud dkk. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik (Studi Di Desa Watudambo Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal*. Manado. UNSRAT
- Edwin, B, 2018, *Dampak Kewenangan Terhadap Tempat Kerja dan Inspirasi*, PT Adinata Press, Jakarta
- Hayat, 2017, *Pelayanan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. (https://www.Rajagrafindo.co.id/produk/manajemen_pelayanan publik-2/)
- Irawan, Nata. (2017). Tata Kelola Desa pada Periode Peraturan Desa. Jakarta: Pendirian Perpustakaan Cahaya Indonesia.
- Lestari, P.M. (2022). Kinerja Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kantor Desa Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. UNMUL
- Musdalipa, Anwar Parawangi, Ihyani Malik dkk. 2017 Sifat Administrasi Publik pada Kantor Desa Parigi Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa. *Jurnal Implementasi Kebijakan*. Makasar. UNISMUH
- Profil, Sosial Ekonomi, Tingkat Pengajaran Kependudukan, Keadaan Sosial dan Budaya, Pekerjaan Penduduk, dan Desain Hierarki Kota Malasan (<https://malasan-durenan.trenggalekkab.go.id/first/article/1>).
- Rusli, Budiman, 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*. Bandung : Hakim Publishing
- Siagian S.P. 1997. *SDM* .Jakarta : Bumi Aksara.
- Tahir, M, Irwan. (2018) Model Efektivitas Organisasi Pemerintahan Desa. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 19 No. 3, November 2017: 233 - 237. (<http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/13070> diakses pada 8 November 2018)